



**DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**BerAKHLAK** ># bangga  
melayani  
bangsa



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan melaporkan hasilnya dalam bentuk buku “ LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024”.

Laporan Kinerja ini secara garis besar menggambarkan tentang kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur yang menangani pembangunan perkebunan khususnya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan.

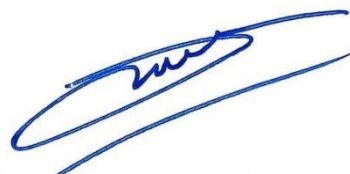
Dengan segala keterbatasan, Laporan Kinerja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak mungkin kami sebutkan semuanya.

Terima kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kutai Timur, yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Kami untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga Dinas Perkebunan.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, Januari 2025

Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Kutai Timur



Ir. H. Sumarjana, MP



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi yang strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Pembangunan sub sektor Perkebunan merupakan bentuk penjabaran dari Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Terselenggaranya Pembangunan Sub Sektor Perkebunan harus mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan diterima oleh seluruh masyarakat. Upaya konkrit dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju pemerintahan yang baik adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku. Berdasarkan ketentuan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah selama kurun waktu tahun 2024, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai, dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2024, dan merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2024 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LKj-IP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggung jawaban Kepala SKPD kepada Bupati Kutai Timur dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Kutai Timur selama tahun 2024 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKj-IP ini. Dalam LKj-IP ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Kutai Timur pada tahun 2024, yang diselenggarakan melalui 6 program (5 program Utama dan 1 program penunjang) dengan 15 Kegiatan serta 39 Sub Kegiatan, yang keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD Kabupaten Kutai Timur, FCPF dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

## **1.3 Dasar Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2023, dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan strategis dan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana , bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan meliputi bidang sarana dan prasarana , bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana, bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran, bidang penyuluhan
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan dinas perkebunan serta
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### **1.4. Permasalahan Utama Organisasi**

Tugas dan fungsi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Prasarana dan Sarana, Penyuluhan, dan Usaha serta Perlindungan Tanaman Perkebunan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Terkait penjabaran di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan adalah sebagai berikut:

## 1. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Pada dasarnya, kuantitas hasil produksi perkebunan dipengaruhi oleh produktivitas dan luasan areal tanam tanaman perkebunan. Penjabaran lebih lanjut, produktivitas tanaman sangat ditentukan oleh kondisi dan kesuburan tanah hingga penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyediaan dan penggunaan prasarana dan sarana produksi merupakan hal yang penting, khususnya agroinput pada tanaman. Hal-hal yang menyebabkan produktivitas tanaman perkebunan yang rendah di Kabupaten Kutai Timur antara :

- Kurang tersedianya benih bermutu di masyarakat;
- Pengendalian OPT telah dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan tetapi belum konsisten dalam penerapan;
- Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
- Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan;
- Budaya dan perilaku petani lokal yang tidak kompetitif;
- Alih fungsi lahan perkebunan.

## 2. Masih dibutuhkan perluasan areal perkebunan

Kajian keterkaitan antara luas areal tanam dengan peningkatan hasil produksi subsektor perkebunan merupakan paradigma lama yang masih terus berkembang hingga saat ini. Meskipun penerapan teknologi dapat mengefisiensikan luas lahan dalam artian peningkatan hasil produksi tanpa perluasan areal tanam yang signifikan, namun hingga saat ini belum diaplikasikan penerapan teknologi tepat guna yang optimal sebagai usaha peningkatan hasil produksi, perluasan areal perkebunan masih sangat dibutuhkan sehingga pembukaan lahan menjadi alternatif utama dalam penyelesaian permasalahan ini. Kabupaten Kutai Timur berpotensi meningkatkan hasil produksi perkebunan melalui perluasan areal perkebunan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam mengaplikasikan perluasan areal perkebunan sebagai solusi peningkatan hasil produksi. Hal-hal yang perlu dicermati berhubungan dengan permasalahan perluasan areal lahan perkebunan meliputi:

- Perubahan RTRW yang belum tuntas;
- Sebagian lahan masih berstatus kawasan budidaya kehutanan;
- Komitmen pengusaha yang masih perlu didukung kebijakan;

### 3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk

Permasalahan terkait nilai tambah dan daya saing pada masyarakat perkebunan di Kabupaten Kutai Timur merupakan masalah yang harus dicarikan solusi baik secara langsung maupun bertahap. Namun dikarenakan kebudayaan masyarakat masih melekat pada pengelolaan perkebunan sehingga sulit untuk mengeluarkan petani perkebunan dari pola pikir mereka yang berusaha mendapatkan penghasilan secara instan. Rincian penyebab permasalahan yang terkait dengan nilai tambah dan daya saing produk subsektor perkebunan antara lain:

- Produk yang dijual petani masih dalam bentuk primer;
- Industri pengolahan hasil perkebunan belum berkembang karena kurang didukung infrastruktur memadai di sentra-sentra produksi perkebunan wilayah pedesaan;
- Pabrik-pabrik yang mengelola hasil perkebunan mempunyai standar dalam memilih bahan baku;
- Petani mengandalkan pedagang-pedagang tradisional untuk menyalurkan hasil perkebunan; dan
- Pedagang pengepul banyak yang memasang harga rendah dan tidak sesuai harga pasar sehingga merugikan petani.

### 4. Perkebunan yang ramah lingkungan

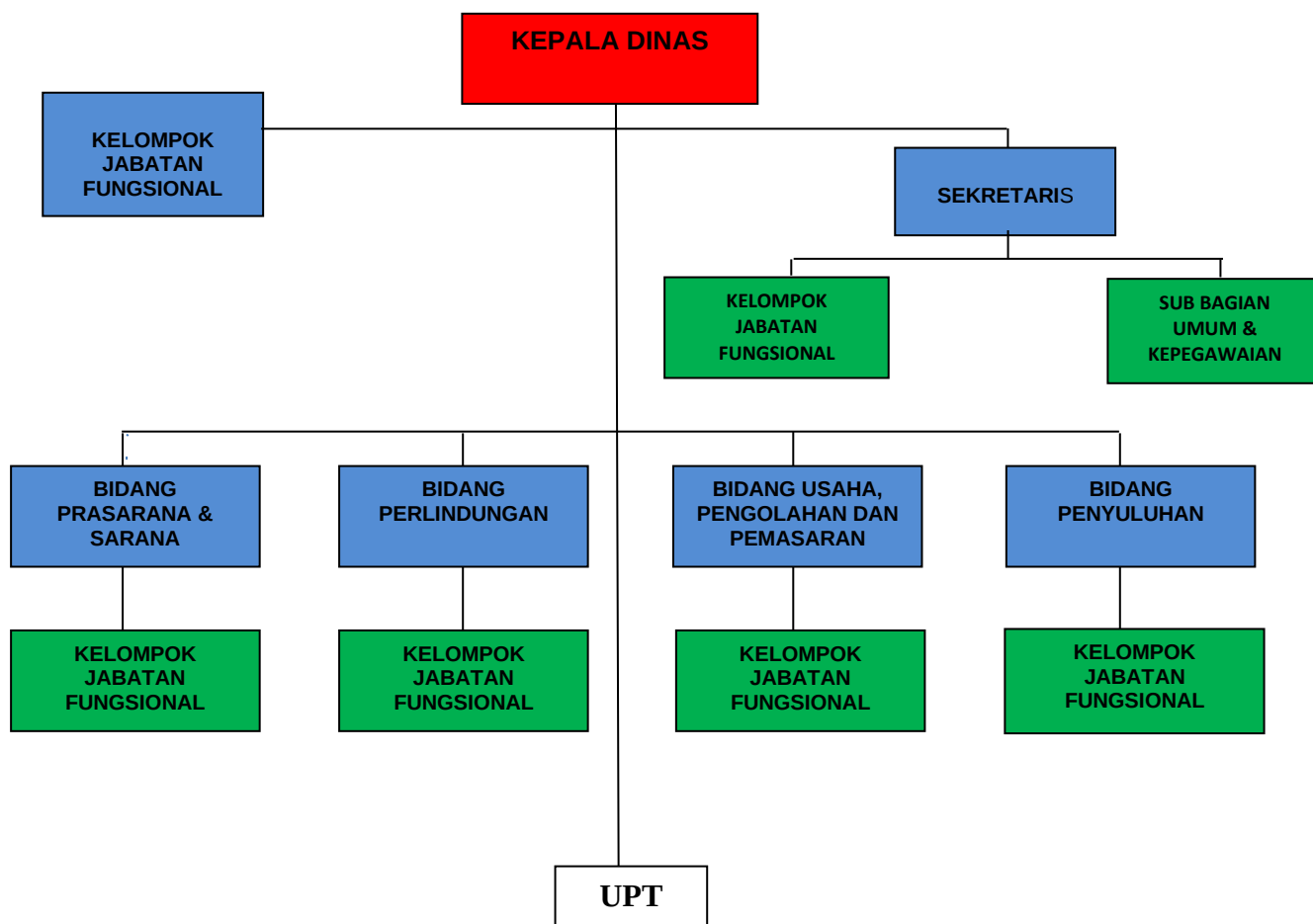
Sebagai salah satu sumber daya alam yang terbaharukan, pembangunan subsektor perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan perkebunan berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup terutama di Kabupaten Kutai Timur. Oleh sebab itu, upaya pembangunan subsektor perkebunan dikaitkan dengan usaha pemerintah daerah maupun nasional dalam komitmennya mewujudkan pembangunan berkelanjutan termasuk di dalamnya meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan eksploitasi saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Oleh karenanya, dalam pengelolaan pada subsektor perkebunan terutama sumber daya alam yang dikelola secara agroindustri, pabrik/industri, maupun pengolahan komoditi perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan, salah satunya

memiliki dokumen analisis mengenai dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan hidup

### 1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, maka dibentuk Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan adalah sebagai berikut :

#### BAGAN STRUKTUR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2023.

## 1.6. Sumberdaya Manusia

Untuk pelaksanaan pembangunan pada sub sektor Perkebunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perkebunan setiap tahun terus meningkat, dalam kelancaran tugas-tugas sesuai kewenangan Dinas Perkebunan telah didukung dengan sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana yang tiap tahun terus dibenahi dan dilengkapi. Kondisi sampai pada saat akhir tahun 2024 Dinas Perkebunan telah memiliki aparatur sebanyak 86 orang dengan rincian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 51 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) sebanyak 2 Orang dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 333 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
  - Aparatur Sipil Negara : 51 Orang
  - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) : 2 Orang
  - Tenaga Kerja Kontrak Daerah : 33 Orang
  
- Jumlah Pegawai berdasarkan Struktural
  - Esselon II : 1 Orang
  - Esselon III : 4 Orang
  - Esselon IV : 1 Orang
  - Non Esselon : 45 Orang
  - PPPK : 2 Orang
  - TK2D : 33 Orang
  
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan
  - Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
  - Pembina TK I (IV/b) : 0 Orang
  - Pembina (IV/a) : 7 Orang
  - Penata TK I (III/d) : 24 Orang
  - Penata (III/c) : 8 Orang
  - Penata Muda TK I (III/b) : 4 Orang
  - Penata Muda (III/a) : 3 Orang



|   |                                           |            |
|---|-------------------------------------------|------------|
|   | Pengatur TK I (II/d)                      | : 3 Orang  |
|   | Pengatur (II/c)                           | : 0 Orang  |
|   | Pengatur Muda TK I                        | : 0 Orang  |
|   | Juru (I/c)                                | : 1 Orang  |
|   | PPPK                                      | : 2 Orang  |
| ➤ | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang |            |
|   | Golongan IV                               | : 8 Orang  |
|   | Golongan III                              | : 39 Orang |
|   | Golongan II                               | : 3 Orang  |
|   | Golongan I                                | : 1 Orang  |
|   | PPPK                                      | : 2 Orang  |
| ➤ | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  |            |
|   | ASN Laki – Laki                           | : 27 Orang |
|   | ASN Perempuan                             | : 24 Orang |
|   | PPPK Laki – Laki                          | : 1 Orang  |
|   | PPPK Perempuan                            | : 1 Orang  |
| ➤ | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan     |            |
|   | S2                                        | : 16 Orang |
|   | S1                                        | : 29 Orang |
|   | DIII                                      | : 1 Orang  |
|   | SLTA                                      | : 6 Orang  |
|   | SMP                                       | : 1 Orang  |

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan selalu berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur dan memperhatikan RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional. Rencana Strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, disamping mengacu pada rencana strategis dan program pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur, juga mengacu pada arah Kebijakan Nasional Pembangunan Pertanian. Untuk Visi dan Misi kita mengacu kepada Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

**“ MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA “**

Visi yang dirumuskan oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi berkelanjutan baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam telaahan visi, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengembangkan kualitas hidup. Dengan memperhatikan kajian pada visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi sosial yang akan dihadapi Kabupaten Kutai Timur pada masa yang akan datang, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berperan dalam membentuk perubahan positif di lingkup nasional, regional dan global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah dirumuskan secara optimal, maka disusunlah Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan lugas namun terarah sesuai



tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan kondisi permasalahan, tantangan ke depan, isu strategis dan memperhitungkan peluang positif yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu**

**Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian**

**Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata**

**Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi**

**Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan**

Dinas Perkebunan dalam melaksanakan pengelolaan teknis subsektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur memiliki posisi strategis dalam ***pencapaian MISI KE II kedua***. Dinas Perkebunan harus berupaya mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui subsektor perkebunan yang berdaya saing melalui perencanaan agroindustri yang jelas dan aplikatif di lapangan tanpa mengindahkan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) perkebunan merupakan alternatif utama dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan yang berimbas pada pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, perkebunan yang sebagian besar menyentuh masyarakat mikro sebagai pelaku usaha pertanian sangat menjanjikan terwujudnya ekonomi kerakyatan, pemanfaatan yang optimal hasil produksi baik sebagai bahan baku energi terbaharukan maupun sebagai produk mentah untuk pabrik olahan akan mampu memberikan peluang lebih bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya, dalam mengkaji beberapa permasalahan subsektor perkebunan menyangkut isu strategis terutama komoditas kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan unggulan utama Kabupaten Kutai Timur yang berdampak buruk bagi lingkungan, perlu adanya pengawasan dan analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut. Meskipun begitu, hasil nyata bahwa seluruh produk utama, turunan, maupun ikutannya dari subsektor perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi merupakan jawaban awal dari kekhawatiran beberapa pihak yang menganggap beberapa komoditas perkebunan menyebabkan degradasi lingkungan terutama terkait struktur tanah

Meskipun sebagai bagian dari sumber daya alam yang terbaharukan, konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan tetap menjadi perhatian utama pada subsektor perkebunan. Beberapa asumsi terhadap beberapa komoditas perkebunan yang berlawanan dengan konsep berkelanjutan tetap ditindaklanjuti dengan melaksanakan kajian komoditas agar pengembangan subsektor perkebunan berkelanjutan sesuai misi kelima RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 tetap berjalan, keberhasilan pembangunan perkebunan harus simetris terhadap penerapan ekonomi hijau yang berdampak langsung dalam mengurangi risiko lingkungan dan kerusakan ekologi

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu selama lima tahun sejak 2021-2026. Dengan dilatarbelakangi oleh berbagai isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua stakeholder satuan kerja perangkat daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Misi Kepala Daerah yang berhubungan langsung dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur adalah **Misi Ke II Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian** sehingga Tujuan SKPD yang akan dicapai adalah **"Meningkatkan peran sektor perkebunan dalam aspek ekonomi berdaya saing serta pembangunan yang berkelanjutan"**

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengembangan ketrampilan petani, dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

**Sasaran** merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai visi dan Misi kepala daerah serta penjabaran dari tujuan rencana strategis adalah Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan



Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Tahun 2021-2026 Dinas Perkebunan dalam mendukung Visi dan Misi Pimpinan Daerah

| NO  | TUJUAN                                                                                  | SASARAN                                                                                           | INDIKATOR SASARAN                                                                                                           | STRATEGI                                                                                                                                                                       | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)                                                                                               | (4)                                                                                                                         | (5)                                                                                                                                                                            | (6)                                                                                                                                                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.  | Mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan                                         | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan           | 1. Jumlah Produksi dan Produktifitas Sektor Perkebunan<br>2. Persentase Total Produksi perkebunan dari tanaman yang berbeda | 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan<br>2. Peningkatan Penerapan konservasi dan pencegahan gangguan usaha perkebunan<br>3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan | 1. Peningkatan Produksi Perkebunan<br>2. Pengembangan Budidaya Perkebunan<br>3. Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi perkebunan<br>4. Peningkatan Penerapan Perkebunan berkelanjutan<br>5. Peningkatan Keterampilan Petani dan Penyuluh | 1. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian<br>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>3. Program Perizinan Usaha Pertanian<br>4. Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian<br>5. Penyuluhan Pertanian |
| 2.  | Meningkatkan pengelolaan administrasi perkantoran,kepegawaian, keuangan dan perencanaan | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                                                             | Peningkatan efektifitas dan Efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan                                                                              | Peningkatan Kualitas Pelayanan, Kuantitas SDM, Kualitas perencanaan, Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Penanganan Aset                                                                                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota                                                                                                                                                                                            |



## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2024

Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

| Program/Kegiatan                                                            | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                                                               | Rencana Tahun 2024    |                        |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                  | Lokasi                | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)      | Sumber Dana |
| 1                                                                           | 2                                                                                                                                                | 3                     | 4                      | 5              | 6           |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                                                                                  | Kabupaten kutai Timur | 100 %                  | 17.547.337.033 | APBD        |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Tersediannya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja                                                                              | Kabupaten Kutai Timur | 6 Dokumen              | 625.000.000    | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                                |                                                                                                                                                  |                       |                        |                |             |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | Kabupaten Kutai Timur | 2 Dokumen              | 150.000.000    | APBD        |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                                               | Kabupaten Kutai Timur | 1 Dokumen              | 100.000.000    | APBD        |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD                                           | Kabupaten Kutai Timur | 1 Dokumen              | 100.000.000    | APBD        |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD                                                               | Kabupaten Kutai Timur | 1 Dokumen              | 50.000.000     | APBD        |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD                                                               | Kabupaten Kutai Timur | 1 Dokumen              | 50.000.000     | APBD        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Kabupaten Kutai Timur | 1 Laporan              | 75.000.000     | APBD        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Kabupaten Kutai Timur | 2 Laporan              | 100.000.000    | APBD        |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                            | Sanggata              | 1 Dokumen              | 12.822.337.033 | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                                |                                                                                                                                                  |                       |                        |                |             |
| Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | Sanggata              | 57 Orang               | 11.017.093.902 | APBD        |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                               | Sanggata              | 35 Dokumen             | 1.305.243.131  | APBD        |



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024**

| Program/Kegiatan                                                          | Indikator kinerja program/kegiatan                                                  | Rencana Tahun 2024                          |                        |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
|                                                                           |                                                                                     | Lokasi                                      | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)     | Sumber Dana |
| 1                                                                         | 2                                                                                   | 3                                           | 4                      | 5             | 6           |
| Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah                | Sanggata                                    | 1 Laporan              | 150.000.000   | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                              |                                                                                     |                                             |                        |               |             |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                       | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah                                       | Sanggata                                    | 1 Dokumen              | 100.000.00    | APBD        |
| Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD                               | Jumlah Laopran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | Sanggata                                    | 1 Laporan              | 50.000.000    | APBD        |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Kabupaten Kutai Timur                       | 92 orang               | 400.000.000   | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                              |                                                                                     |                                             |                        |               |             |
| Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya                                     | Sanggata                                    | 2 Paket                | 250.000.000   | APBD        |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur        | 10 Orang               | 150.000.000   | APBD        |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Kabupaten Kutai Timur                       | 5 Jenis                | 1.320.000.000 | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                              |                                                                                     |                                             |                        |               |             |
| Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan  | Sanggata                                    | 2 Paket                | 50.000.000    | APBD        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                              | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Sanggata                                    | 5 Paket                | 500.000.000   | APBD        |
| Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | Sanggata                                    | 1 Laporan              | 50.000.000    | APBD        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                      | Luar dan Dalam daerah Kabupaten Kutai Timur | 25 Laporan             | 470.000.000   | APBD        |
| Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | Sanggata                                    | 1 Dokumen              | 250.000.000   | APBD        |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jenis Barag yang Disediakan                                                         | Sanggata                                    | 1 Jenis                | 200.000.000   | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                              |                                                                                     |                                             |                        |               |             |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan                                     | Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan                      | Sanggata                                    | 1 Unit                 | 200.000.000   | APBD        |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia                                                 | Sanggata                                    | 4 Jenis Jasa           | 300.000.000   | APBD        |



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**TAHUN 2024**

| Program/Kegiatan                                                                                                  | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                                | Rencana Tahun 2024           |                        |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                   | Lokasi                       | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)             | Sumber Dana    |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                 | 3                            | 4                      | 5                     | 6              |
| Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                                           | Sanggata                     | 1 laporan              | 150.000.000           | APBD           |
| Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                              | Sanggata                     | 1 Laporan              | 150.000.000           | APBD           |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintah Daerah                                  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                    | Kabupaten Kutai Timur        | 3 Jenis                | 1.730.000.000         | APBD           |
| Sub Kegiatan                                                                                                      |                                                                                                                   |                              |                        |                       |                |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                    | Sanggata                     | 45 Unit                | 230.000.000           | APBD           |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                   | Sanggata                     | 20 Unit                | 100.000.000           | APBD           |
| Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitas                                          | Sanggata                     | 4 Unit                 | 1.400.000.000         | APBD           |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                       | <b>Jumlah Produksi Perkebunan</b>                                                                                 | <b>Kab. Kutai Timur</b>      | <b>6.000.000 Ton</b>   | <b>14.395.000.000</b> | <b>APBD II</b> |
| Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                   | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                              | Kabupaten Kutai Timur        | 500 Ha                 | 14.095.000.000        | APBD II        |
| Sub Kegiatan                                                                                                      |                                                                                                                   |                              |                        |                       |                |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi        | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan              | 10.750.000.000        | APBD           |
| Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                         | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan              | 3.345.000.000         | APBD           |
| Kegiatan Pengolahan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman                                                       | Terlaksananya Pengelolaan SDG Tumbuhan                                                                            | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Komoditi             | 300.000.000           | APBD           |
| Sub Kegiatan                                                                                                      |                                                                                                                   |                              |                        |                       |                |
| Kegiatan Pengolahan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman                                                       | Terlaksananya Pengelolaan SDG Tumbuhan                                                                            | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Komoditi             | 300.000.000           | APBD           |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                    | <b>Jumlah Prasarana Pertanian yang disediakan</b>                                                                 | <b>Kabupaten kutai Timur</b> | <b>1 Prasarana</b>     | <b>10.750.000.000</b> | <b>APBD</b>    |
| Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                         | Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian                                                                    | Kabupaten kutai Timur        | 250/300 Pekebun/Ha     | 9.950.000.000         | APBD           |
| Sub Kegiatan                                                                                                      |                                                                                                                   |                              |                        |                       |                |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana                                                                             | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana                                                                      | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan              | 9.950.000.000         | APBD           |



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**TAHUN 2024**

| Program/Kegiatan                                                                                      | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                                    | Rencana Tahun 2024           |                        |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                       | Lokasi                       | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)            | Sumber Dana |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                     | 3                            | 4                      | 5                    | 6           |
| Pendukung Pertanian Lainnya                                                                           | Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                           |                              |                        |                      |             |
| Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian                                                              | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                         | Kabupaten kutai Timur        | 1.800 Meter            | 800.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                       |                              |                        |                      |             |
| Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                            | Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara                                                         | Kabupaten Kutai Timur        | 5 Unit                 | 800.000.000          | APBD        |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                      | <b>Luas Bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi</b>                                                     | <b>Kabupaten kutai Timur</b> | <b>240 ha</b>          | <b>1.300.000.000</b> | <b>APBD</b> |
| Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota                           | Terkendalinya dan Ditanggulangnya Bencana Pertanian                                                                   | Kabupaten Kutai Timur        | 240 Ha                 | 1.300.000.000        | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                       |                              |                        |                      |             |
| Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan         | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani | Kabupaten Kutai Timur        | 50 Ha                  | 350.000.000          | APBD        |
| Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                 | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                             | Kabupaten Kutai Timur        | 100 Ha                 | 400.000.000.-        | APBD        |
| Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan   | Kabupaten Kutai Timur        | 90 Ha                  | 550.000.000          | APBD        |
| <b>PROGRAM IZIN USAHA PERTANIAN</b>                                                                   | <b>Jumlah PBS / Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi Izinnya</b>                                                    | <b>Kabupaten kutai Timur</b> | <b>23 PBS/Kop</b>      | <b>607.373.219</b>   | <b>APBD</b> |
| Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten / Kota         | Terlaksannaya Pengawasan Izin Usaha Perkebunan                                                                        | Kabupaten kutai Timur        | 33 PBS/Kop             | 607.373.219          | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                       |                              |                        |                      |             |
| Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Izin Usaha Pertanian                                   | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Izin Usaha Pertanian                                            | Kabupaten Kutai Timur        | 23 Dokumen             | 307.373.219          | APBD        |
| Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian                                               | Jumlah Izin Usaha yang dibina atau diawasi                                                                            | Kabupaten Kutai Timur        | 10 Laporan             | 300.000.000          | APBD        |
| <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                   | <b>Jumlah Sumber Daya yang ditingkatkan</b>                                                                           | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>350 Orang</b>       | <b>4.600.000.000</b> | <b>APBD</b> |
| Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian                                                               | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia                                                                            | Kabupaten Kutai Timut        | 350 Orang              | 4.600.000.000        | APBD        |
| Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                       |                              |                        |                      |             |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di kecamatan dan Desa                            | Jumlah Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya                  | Kabupaten Kutai Timur        | 18 Unit                | 2.250.000.000        | APBD        |
|                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                        |                      |             |



| Program/Kegiatan                                                                      | Indikator kinerja program/kegiatan                                             | Rencana Tahun 2024    |                        |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                       |                                                                                | Lokasi                | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)     | Sumber Dana |
| 1                                                                                     | 2                                                                              | 3                     | 4                      | 5             | 6           |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa         | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya | Kabupaten Kutai Timur | 11 Unit                | 2.000.000.000 | APBD        |
| Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian                                 |                       | 1 Unit                 | 50.000.000    | APBD        |
| Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang terbentuk dan beroperasi              | Kabupaten Kutai Timur | 3 Unit                 | 300.000.000   | APBD        |

Rencana kerja Dinas Perkebunan disusun pada tahun 2023 sehingga mengikuti Nomenklatur program yang terbaru berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen Perjanjian Kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.3 . Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                               | 4             |
| 1  | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan                                    | 6.100.000 Ton |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi perkantoran dan Laporan keuangan                  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan | 100%          |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 66,5 (Enam puluh enam koma lima) atau dengan predikat penilaian B (Baik), Akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama dan perlu ada perbaikan pada unit kerja serta perlunya komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja, sebagaimana tabel berikut :

| No                                 | Komponen yang Dinilai                   | Bobot (%)     | Nilai 2023   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| 1                                  | Perencanaan Kinerja                     | 30,00         | 20,40        |
| 2                                  | Pengukuran Kinerja                      | 20,00         | 13,80        |
| 3                                  | Pelaporan Kinerja                       | 10,00         | 6,90         |
| 4                                  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 20,00         | 11,80        |
| 5                                  | Capaian Kinerja                         | 20,00         | 13,80        |
| <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b> |                                         | <b>100,00</b> | <b>66,50</b> |
| <b>Kategori Penilaian</b>          |                                         |               | <b>B</b>     |

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Dinas Perkebunan kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa rekomendasi antara lain :

- Perencanaan kinerja disarankan agar setiap kepala bidang merumuskan dan menetapkan perjanjian kinerja, memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perjanjian kinerja dan IKI, memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- Dalam Pengukuran Kinerja agar memberikan feedback , pemantauan secara berjenjang sampai dengan level terbawah agar pengukuran kinerja menjadi lebih baik. Pengukuran Kinerja dapat dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai di Dinas Perkebunan kabupaten Kutai Timur;
- Evaluasi akuntabilitas internal agar dilakukan secara berkala oleh organisasi

perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar notulen rapat dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV disertakan presentasi keberhasilan capaian kegiatan dan tertuang rekomendasi perbaikan atas capaian kegiatan.

Tindak lanjut dari Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur akan digunakan oleh Dinas Perkebunan untuk meningkatkan kinerja dinas, serta khususnya indikator kinerja individu aparatur Dinas Perkebunan agar dapat dicapai dan diraih dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Perlunya juga meningkatkan informasi perlunya implementasi SAKIP di setiap sector perkebunan. Dinas Perkebunan masih sedikit belum focus / orientasi hasil terhadap tujuan dan sasaran dalam perencanaan baik untuk menitik beratkan pada strategi dan kebijakan yang akan dicapai setiap tahunnya. Perlunya evaluasi kinerja terutama terhadap Perjanjian Kinerja SKPD agar diperlihatkan ukuran kinerja yang lebih baik. Sedangkan untuk laporan kinerja sendiri perlu ada keterhubungan antar kinerja dan hasil dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Dinas perkebunan sangat Perlu menerapkan reward dan punishment agar aparatur bisa menumbuhkan kembangkan kapasitas kompetensinya untuk lebih baik lagi.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, Instansi wajib melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1.  
Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET        | REALISASI     | %    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1  | Meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan                                    | 6.100.000 Ton | 6.226.862 Ton | 100% |
| 2  | Terpenuhinya tata kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan                  | Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan | 100 %         | 90 %          | 90%  |

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2.1.  
Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA            | TARGET        | REALISASI     | %    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1  | Meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan | 6.100.000 Ton | 6.226.862 Ton | 100% |

Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi dan Produktivitas serta mendorong diversifikasi produk Komoditi Perkebunan dengan indicator kinerja jumlah produksi komoditi perkebunan telah dicapai 100% dari target jumlah produksi komoditi perkebunan dari target yang harus dicapai 6.100.000 ton tercapai sebesar 6.6.226.862 ton. Produksi komoditi perkebunan masih angka indikatif/sementara, diperkirakan bisa bertambah nilainya karena laporan perkebunan besar swasta untuk semester IV banyak yang belum masuk, serta produksi Pabrik CPO/PKO belum semuanya melaporkan produksinya ke Dinas Perkebunan. Data sektoral harus divalidasi dulu oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peningkatan produksi terutama didukung oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Mitra serta petani swadaya terutama untuk Komoditi Kelapa Sawit. Komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur merupakan komoditi terluas dibandingkan dengan komoditi yang lain. Perkebunan besar swasta, mitra serta kelompok tani berupaya untuk meningkatkan produksi komoditi perkebunan dengan beberapa upaya dan peran hasil antar stakeholder terkait. Untuk Angka Produktivitas dari target 16,50 ton/ha baru mencapai 12,85 ton/ha. Untuk produktivitas di upayakan untuk semua komoditi tetapi untuk kinerja hanya untuk komoditi Kepala Sawit. Begitu juga dengan produktivitas komoditi perkebunan untuk angka tetapnya masih menunggu laporan dari Pabrik CPO untuk jumlah TBS yang diolah serta laporan dari Perusahaan Perkebunan.

Sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan terdiri atas beberapa program pendukung antara lain :

**Tabel 3.2.2**  
**Program, Indikator dan Capaian Program Tahun 2024**

| NO | PROGRAM                                                   | INDIKATOR                                                        | TARGET 2024   | CAPAIAN 2024  | %      |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian      | Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan                              | 6.100.000 Ton | 6.226.862 Ton | 100%   |
| 2  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   | Jumlah Prasarana Pertanian yang disediakan                       | 1 Prasarana   | 0 Prasarana   | 0%     |
| 3  | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Luas Bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi       | 400 Ha        | 350 Ha        | 87,5 % |
| 4  | Program Perizinan Usaha Pertanian                         | Jumlah PBS / Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi perizinannya | 33 PBS/Kop    | 35 PBS/Kop    | 100%   |
| 5  | Program Penyuluhan Pertanian                              | Jumlah sumber daya yang ditingkatkan                             | 226 Orang     | 342 Orang     | 100%   |



Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdapat 2 kegiatan antara lain (1) Kegiatan pengawasan penggunaan Sarana pertanian dengan indikator kinerja luas ekstensifikasi intensifikasi rehabilitasi dan sarana pengolahan hasil dengan target 750 Ha dan tercapai 750 Ha (100%) (2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan kabupaten / kota dengan indikator kinerja jumlah komoditi yang dikelola adalah 1 komoditi yakni komoditi aren. Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana produksi serta penyediaan alat pasca panen. Untuk tahun 2024 hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat antara lain :

Tabel 3.2.3.

Matriks Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2024

| NO | KECAMATAN/DESA | KELOMPOK TANI        | HIBAH BARANG | VOLUME    | KET.              |
|----|----------------|----------------------|--------------|-----------|-------------------|
| 1  | Teluk Pandan   |                      |              |           |                   |
|    | Kandolo        | Syukur               | Hansdprayer  | 21 Unit   | Realisasi         |
|    |                |                      | Herbisida    | 105 Liter |                   |
|    |                |                      | Pupuk NPK    | 8.200 Kg  |                   |
|    |                | Karya Berkembang     | Mesin Rumput | 35 Unit   | Tidak Terealisasi |
|    |                | Insan Agro           | Pupuk NPK    | 10.900 Kg | Realisasi         |
|    | Teluk Pandan   | Subur jaya           | Handsprayer  | 30 Unit   | Realisasi         |
|    |                | Sumber Sri rejeki    | Handsprayer  | 27 Unit   | Realisasi         |
|    |                | Ternak jaya          | Handsprayer  | 22 Unit   | Realisasi         |
|    |                | Sempayang jaya 2     | Handsprayer  | 22 Unit   | Realisasi         |
|    |                | Maju Sipatukong      | Handsprayer  | 25 Unit   | Realisasi         |
| 2  | Rantau Pulung  |                      |              |           |                   |
|    | Rantau Makmur  | Jaya Makmur          | Herbisida    | 300 Liter | Realisasi         |
|    |                | Integrasi Sapi sawit | Herbisida    | 300 Liter | Realisasi         |
|    | Manunggal Jaya | Tunas Jadi           | Pupuk NPK    | 5.450 Kg  | Realisasi         |
|    | Tanjung Labu   | Usaha Bersama        | Pupuk NPK    | 5.450 Kg  | Realisasi         |
|    |                | Bobo Sari            | Pupuk NPK    | 5.450 Kg  | Realisasi         |
|    | Margo Mulyo    | Suka Maju Permai     | Pupuk NPK    | 5.450 Kg  | Realisasi         |
|    |                | Rowo makmur          | Pupuk NPK    | 5.450 Kg  | Realisasi         |
|    | Mukti Jaya     | Mulya Jaya           | Pupuk NPK    | 5.450 Kg  | Realisasi         |
|    |                | Holtik Raya          | Pupuk NPK    | 5.450 Kg  | Realisasi         |
|    |                | Green Agri           | Pupuk NPK    | 5.450 Kg  | Realisasi         |
|    | Pulung sari    | Karya Sejahtera      | Pupuk NPK    | 5.450 Kg  | Realisasi         |



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN/DESA  | KELOMPOK TANI          | HIBAH BARANG | VOLUME    | KET.              |
|----|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| 3  | Bengalon        |                        |              |           |                   |
|    | Sekerat         | Sekurau Bersatu A      | Pupuk NPK    | 8.950 Kg  | Realisasi         |
|    |                 | Sekurau Bersatu B      | Pupuk NPK    | 8.950 Kg  | Realisasi         |
|    | Tepian Baru     | Rimba Sekampung        | Pupuk NPK    | 10.900 Kg | Realisasi         |
| 4  | Busang          |                        |              |           |                   |
|    | Long Pejeng     | Tunas Muda mandiri     | Handsprayer  | 35 Unit   | Realisasi         |
| 5  | Long Mesangat   |                        |              |           |                   |
|    | Sika Makmur     | Gapoktan Marga Jaya    | Handsprayer  | 27 Unit   | Realisasi         |
|    | Segoy Makmur    | Sumber Subur           | Handsprayer  | 30 Unit   | Realisasi         |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 9.750 Kg  | Realisasi         |
|    | Mukti Utama     | Sri Rejeki             | Handsprayer  | 34 Unit   | Realisasi         |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 15.600 Kg | Realisasi         |
|    |                 | Harapan Jaya           | Handsprayer  | 27 unit   | Realisasi         |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 11.700 Kg | Realisasi         |
|    | Sumber Agung    | Harapan Baru           | Handsprayer  | 31 Unit   | Realisasi         |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 11.700 Kg | Realisasi         |
|    |                 | Tunas Jaya             | Handsprayer  | 19 unit   | Realisasi         |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 7.800 Kg  | Realisasi         |
|    |                 | TaniMaju               | Pupuk NPK    | 11.700 Kg | Realisasi         |
|    | Sumber sari     | Sri Pantun             | Handsprayer  | 28 unit   | Realisasi         |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 9.750 Kg  | Realisasi         |
|    |                 | Bina karya             | Handsprayer  | 25 unit   | Realisasi         |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 14.200 Kg | Realisasi         |
|    |                 | Marga Mulya            | Handsprayer  | 22 Unit   | Realisasi         |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 7.800 Kg  | Realisasi         |
|    |                 | Marga sari             | Handsprayer  | 34 Unit   | Realisasi         |
| 6  | Muara Ancalong  |                        |              |           |                   |
|    | Kelinjau Ulu    | Tunas karya            | Pupu NPK     | 8.000 Kg  | Realisasi         |
|    |                 | Ingin Bersama          | Pupuk NPK    | 8.000 Kg  | Realisasi         |
| 7  | Batu Ampar      |                        |              |           |                   |
|    | Batu Timbau Ulu | Tunas Suwili           | Pupuk NPK    | 8.400 Kg  | Realisasi         |
| 8  | Kongbeng        |                        |              |           |                   |
|    | Kongbeng Indah  | Pantun Agri Sejahtera  | Mesin Rumput | 4 Unit    | Tidak Terealisasi |
|    |                 |                        | Tractor      | 3 Unit    |                   |
|    |                 | Sejahtera              | Pupuk NPK    | 15.600 Kg | Terealisasi       |
|    |                 | Sawit Sektor Sejahtera | Pupuk NPK    | 15.600 Kg | Terealisasi       |
|    |                 | Sumber Subur           | Pupuk NPK    | 15.600 Kg | Terealisasi       |
|    |                 | Sumber Baru            | Handsprayer  | 20 Unit   | Terealisasi       |
|    |                 | Harapan Bersama        | Pupuk NPK    | 8.400 Kg  | Terealisasi       |
|    | Suka Maju       | Hidup Baru             | Handsprayer  | 42 Unit   | Terealisasi       |



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN/DESA       | KELOMPOK TANI | HIBAH BARANG | VOLUME    | KET.      |
|----|----------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 9  | Telen                |               |              |           |           |
|    | Muara Pantun         | Sumber Pangan | Handsprayer  | 32 unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 160 Liter | Realisasi |
|    |                      | Karya Pantun  | Handsprayer  | 32 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 160 Liter | Realisasi |
|    |                      | T. Ma'au Baru | Handsprayer  | 50 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 250 Liter | Realisasi |
|    |                      | Mandiri Jaya  | Handsprayer  | 38 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 190 Liter | Realisasi |
|    |                      | Swadaya Etam  | Handsprayer  | 28 unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 140 Liter | Realisasi |
|    |                      | Swadaya Jaya  | Handsprayer  | 25 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 125 Liter | Realisasi |
|    | Long Noran           | Muara Demang  | Handsprayer  | 32 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 160 Liter | Realisasi |
|    | Juk Ayaq             | Sumber Rejeki | Handsprayer  | 35 unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 175 Liter | Realisasi |
|    |                      | Batu Bulan    | Handsprayer  | 72 Liter  | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 360 Liter | Realisasi |
|    |                      | Usaha Harapan | Handsprayer  | 30 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 160 Liter | Realisasi |
| 10 | Kaliorang            |               |              |           |           |
|    | Bangun Jaya          | Tani Mukti    | Pupuk NPK    | 20.300 Kg | Realisasi |
|    |                      |               | Handsprayer  | 26 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 130 Liter | Realisasi |
|    |                      | Sumber Rejeki | Handsprayer  | 25 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 125 Liter | Realisasi |
|    | Bukit Makmur         | Usaha Bersama | Handsprayer  | 26 unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 130 Liter | Realisasi |
|    | Citra Manunggal Jaya | Bina Karya    | Pupuk NPK    | 12.450 Kg | Realisasi |
|    |                      |               | Handsprayer  | 27 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 135 Liter | Realisasi |
|    |                      | Karya Bersama | Handsprayer  | 31 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 155 Liter | Realisasi |
|    | Bumi Sejahtera       | Mekar Sari    | Handsprayer  | 20 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 100 Liter | Realisasi |
|    |                      | Tegal Sari    | Handsprayer  | 20 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 100 Liter | Realisasi |
| 11 | Kaubun               |               |              |           |           |
|    | Mata Air             | Sinar Mulya   | Handsprayer  | 15 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 75 Liter  | Realisasi |
|    |                      | Sari Indah    | Handsprayer  | 20 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 100 Liter | Realisasi |
|    |                      | Bali Nusa     | Handsprayer  | 15 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 75 Liter  | Realisasi |
|    |                      | Mekar Abadi   | Handsprayer  | 25 Unit   | Realisasi |
|    |                      |               | Herbisida    | 125 Liter | Realisasi |



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN/DESA  | KELOMPOK TANI          | HIBAH BARANG | VOLUME    | KET.      |
|----|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|
|    | Mata Air        | Sumber Rejeki          | Handsprayer  | 23 Unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 115 Liter | Realisasi |
|    | Bukit Permata   | Rimba Raya             | Handsprayer  | 40 Unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 200 Liter | Realisasi |
|    | Bumi Rapak      | Harapan Jaya           | Handsprayer  | 11 Unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 55 Liter  | Realisasi |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 12.450 Kg | Realisasi |
| 12 | Sangkulirang    |                        |              |           |           |
|    | Maloy           | Sungai Harapan         | Handsprayer  | 29 unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 145 Liter | Realisasi |
|    | Benua Baru Ilir | Cahaya Makmur          | Handsprayer  | 20 unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 150 Liter | Realisasi |
|    | Kolek           | Karya etam             | Pupuk NPK    | 12.450 Kg | Realisasi |
|    |                 |                        | Handsprayer  | 26 unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 130 Liter | Realisasi |
|    | Kerayaan        | Benih Unggul           | Pupuk NPK    | 8.350 Kg  | Realisasi |
|    |                 | Makkawaru              | Handsprayer  | 15 unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 75 Kg     | Realisasi |
|    | Saka            | Sungai Leper           | Handsprayer  | 15 Unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 75 Liter  | Realisasi |
|    | Benua baru Ilir | Bunga Ketoeng          | Handsprayer  | 22 Unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 110 Liter | Realisasi |
|    | Mandu Sejahtera | Pantai Guntung Mandiri | Handsprayer  | 18 unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 90 Liter  | Realisasi |
| 13 | Karangan        |                        |              |           |           |
|    | Mukti Lestari   | Kalimutu               | Handsprayer  | 27 unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 135 Liter | Realisasi |
|    |                 | Rawa Indah             | Handsprayer  | 23 unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 115 Liter | Realisasi |
|    |                 | Pratama                | Handsprayer  | 14 unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 70 Liter  | Realisasi |
|    |                 | Giri Mukti             | Handsprayer  | 24 Unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 120 Liter | Realisasi |
|    |                 |                        | Pupuk NPK    | 12.450 Kg | Realisasi |
|    |                 | Mata Air Bumi Etam     | Handsprayer  | 25 Unit   | Realisasi |
|    |                 |                        | Herbisida    | 125 Liter | Realisasi |

Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk mengakomodir usulan masyarakat dalam permohonan bantuan saprodi yang berkualitas sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemberian bantuan kepada petani pekebun sehingga dapat meningkatkan luas baku lahan dan produktivitas lahan. Pelaksanaan kegiatan di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Telu pandan, Rantau Pulung, Bengalon, Busang, Long Mesangat, Muara Ancalong, Batu Ampar, Kongbeng, Telen, Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang dan Karang.

Penerima hibah dari kegiatan tersebut adalah kelompok tani yang telah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dengan melampirkan proposal, rekomendasi desa, rekomendasi camat, berita acara pembentukan kelompok tani dan struktur keanggotaan dan masuk di sistem penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) serta sket lokasi disertai dengan titik koordinat.

Permasalahan pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi khususnya dalam pelaksanaan penyediaan sarana produksi antara lain :

➤ Status lahan

Terkait dengan status lahan yang belum *clear and clean* untuk calon penerima sehingga memerlukan waktu yang lama karena banyak hasil pendataan verifikasi Calon petani dan calon lahan (CP-CL) masuk dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK), sehingga harus dicarikan lokasi yang lain .

➤ Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaa penyediaan barang berupa pengadaan alat pertanian Kecamatan Kongbeng dan Teluk Pandan berupa pengadaan traktor dan mesin Rumput tidak bisa dilaksanakan karena distributor alat tersebut tidak bisa melakukan pengiriman di luar Jawa, dan tidak tersedia alat yang sesuai dengan spesifikasi yang ada.

Tindak lanjut dalam menyelesaikan permasalahan : (1) Pada saat penyampaian proposal oleh kelompok tani agar melampirkan peta dan titik koordinat lahan sehingga status lahan belum jelas bisa mengganti secepatnya kelompok tani yang status lahannya sudah aman, (2) Proses pengadaan bisa dilakukan lebih awal, agar pelaksanaan penyediaan barang dan jasa bisa tepat waktu dilaksanakan dan harus ada koordinasi antara pelaksana dan penyedia barang/jasa.



Tabel 3.2.4.

Matriks Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2024  
Pengadaan Alat Pasca Panen

| NO | KECAMATAN/DESA  | KELOMPOK TANI         | HIBAH BARANG   | VOLUME  | KET.        |
|----|-----------------|-----------------------|----------------|---------|-------------|
| 1  | Bengalon        |                       |                |         |             |
|    | Muara Bengalon  | Subur Jaya            | Egrek          | 44 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gagang Egrek   | 44 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gerobak Dorong | 44 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gancu          | 44 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Tojok          | 44 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Dodos          | 44 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Timbangan      | 44 Unit | Terealisasi |
|    | Tepian Langsung | Ambur Batu Jaya       | Egrek          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gagang Egrek   | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gerobak Dorong | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gancu          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Tojok          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Dodos          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Timbangan      | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 | Maju                  | Egrek          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gagang Egrek   | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gerobak Dorong | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gancu          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Tojok          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Dodos          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Timbangan      | 22 Unit | Terealisasi |
|    | Tepian Baru     | Rimba Sekampung       | Egrek          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gagang Egrek   | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gerobak Dorong | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gancu          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Tojok          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Dodos          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Timbangan      | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 | Sumber Tani Mulya     | Egrek          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gagang Egrek   | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gerobak Dorong | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Gancu          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Tojok          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Dodos          | 22 Unit | Terealisasi |
|    |                 |                       | Timbangan      | 22 Unit | Terealisasi |
| 2  | Sangkulirang    |                       |                |         |             |
|    | Pelawan         | Ketapang Etam Bersatu | Quick Truck    | 7 Unit  | Terealisasi |



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN/DESA | KELOMPOK TANI         | HIBAH BARANG   | VOLUME      | KET.        |
|----|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| 3  | Muara Bengkal  |                       |                |             |             |
|    | Benua Baru     | Gapoktan Maju Bersama | Pisau Sadap    | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Bak Pembeku    | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Bahan Pembeku  | 200 Unit    | Terealisasi |
|    |                |                       | Mangkok sadap  | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                |                       | Ring mangkok   | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                |                       | Tulang sadap   | 10.000 Unit | Terealisasi |
| 4  | Kaliorang      |                       |                |             |             |
|    | Bumi Sejahtera | Mertasari             | Egrek          | 16 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gagang Egrek   | 16 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gerobak Dorong | 16 Unit     | Terealisasi |
|    |                | Purwotani             | Egrek          | 18 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gagang Egrek   | 18 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gerobak Dorong | 18 Unit     | Terealisasi |
|    | Bukit Makmur   | Karya Bersatu         | Egrek          | 19 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gagang Egrek   | 19 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gerobak Dorong | 19 Unit     | Terealisasi |
|    | Bukit harapn   | Karya Tani            | Egrek          | 45 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gagang Egrek   | 45 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gerobak Dorong | 45 Unit     | Terealisasi |
|    |                | Agro Tani             | Egrek          | 30 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gagang Egrek   | 30 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gerobak Dorong | 30 Unit     | Terealisasi |
|    |                | Tani Makmur           | Egrek          | 35 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gagang Egrek   | 35 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gerobak Dorong | 35 Unit     | Terealisasi |
| 5  | Rantau Pulung  |                       |                |             |             |
|    | Kebon Agung    | Sumber Rejeki         | Egrek          | 44 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gagang Egrek   | 44 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gerobak Dorong | 44 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Gancu          | 44 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Tojok          | 44 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Dodos          | 44 Unit     | Terealisasi |
|    |                |                       | Timbangan      | 44 Unit     | Terealisasi |

Tabel. 3.2.5.  
Pelaksanaan Pembinaan Penanganan Pasca Panen

| NO | KECAMATAN DESA                                                                              | KELOMPOK TANI                          | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kecamatan Long Mesangat<br>Desa Sika Makmur dan Desa Mukti Utama                            | UPPB Berkah Mandiri dan UPPB Etam Jaya | Pengawasan Unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet (BOKAR). Pengamatan terkait pengelolaan karet (bahan baku, pengolahan, pemasaran), kualitas produk (tekstur, warna, standar mutu). Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual bokar, memperbaiki tata kelola pemasaran, peningkatan pendapatan petani.                                                                                            |
| 2  | Kecamatan Sangkulirang<br>Desa Tepian Terap dan Kecamatan Long Mesangat<br>Desa Mukti Utama | Karya Bersama dan UPPB Berkah mandiri  | Bimbingan teknis pasca panen karet. Diikuti oleh 25 orang dari KT Bersama dan 25 Orang dari UPPB Berkah mandiri. Materi yang diajarkan adalah penguatan kelembagaan petani, penanganan pasca panen karet, praktek penyadapan dan penggunaan pembeku lateks.                                                                                                                                                             |
| 3  | Kecamatan Teluk Pandan<br>Desa kandolo                                                      | Nyiur Melambai                         | Pengawasan Unit pengolahan gula aren. Peningkatan daya saing produk terhadap keamanan pangan serta mendukung kesejahteraan petani. Pengawasan terhadap pengolahan dan pemasaran komoditi aren dan produk turunannya.                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Kecamatan Kaibun<br>Desa Pengadan Baru                                                      | Desa pengadan baru                     | Pembinaan dan Pengawasan pasca panen kakao dan unit pengolahannya. Pengawasan terhadap pengolahan kakao serta kualitas produk dan penguatan kelembagaan pemasaran kakao yang berkelanjutan. Pengawasan juga terhadap sarana prasarana pengolahan, kebutuhan ketersediaan bahan baku, serta inventarisasi kebutuhan kelompok tani dalam pengelolaan pasca panen yang sesuai standar baik SDM, alat dan pemasaran produk. |
| 5  | Jember Jawa Timur                                                                           | Kecamatan busang                       | Pelatihan budidaya dan pengolahan pasca panen komoditi kakao yang diikuti sebanyak 20 orang dilaksanakan di Puslitkoka Jember Jawa Timur. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petanin dalam budidaya dan pengolahan pasca panen dalam meningkatkan produktivitas serta mutu hasil panen. Sarana dan sarana pengolahan, proses pengemasan serta aspek pemasaran yang terintegrasi dan berkelanjutan.                |
|    |                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Pelaksanaan kegiatan penggunaan sarana pertanian, sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada tahun 2024 terkait penanganan pasca panen dan promosi serta pemasaran memberikan manfaat dan dampak :

- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani/keompok tani dalam penanganan pasca panen dan produk pengolahan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.
- Mendukung program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan dengan membuka akses pemasaran seluas luasnya dengan memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan sesuai pasar, menambah nilai daya saing ditingkat global serta memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial dalam pemasaran, serta menempatkan produk di marketplace.
- Pendataan harga pasar komoditi perkebunan yang dilaksanakan secara berkala (harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan) mendapatkan informasi harga secara periodik sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah pergerakan harga komoditas secara realtime. Mengetahui potensi sentra produksi komoditi perkebunan bagi pengumpul/pengepul baik harga serta lokasi produksinya.
- Pelaksanaan promosi/pameran pada tahun 2024 dilaksanakan di 2 cara yakni pameran KUTIM EXPO di kecamatan Sangatta Utara dan KALTIM EXPO yang dilaksanakan di Kota Samarinda, menjadi sarana penyebarluasan informasi komoditi perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dikenal luas oleh masyarakat terutama produk olahan dan membuka pangsa pasar yang lebih luas.
- Penetapan harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur menjadi anggota Tim penetapan harga. Penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit didasarkan pada tahun tanam komoditi kelapa sawit sehingga perusahaan besar swasta yang mempunyai pabrik kelapa sawit mempunyai kewajiban untuk membeli hasil tandan buah segar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terkhusus untuk kebun masyarakat yang sudah bermitra dengan perkebunan besar swasta. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perkebunan bisa mengenakan sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan/surat keputusan yang telah ditetapkan.
- Tersedianya data dan informasi harga dan akses pemasaran komoditi perkebunan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pemerintah pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan penanganan pasca panen hasil komoditi perkebunan antara lain :

- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran petani sebagai produsen / pelaku pasar terhadap penanganan pasca panen komoditi perkebunan sesuai standar yang berpengaruh terhadap mutu hasil produk komoditi perkebunan;
- Kecenderungan petani yang ingin memperoleh penghasilan dengan cepat dari hasil panen, sehingga tidak menerapkan pengolahan yang dianjurkan sesuai dengan ketentuan atau standar operasional prosedur serta tidak menggunakan teknologi pengolahan yang baik.
- Belum berkembangnya kelembagaan petani dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil panen komoditi perkebunan;
- Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana pengolahan hasil di tingkat petani/kelompok tani, terkait dengan keahlian /skill petani dan ketersediaan bahan baku.
- Kemitraan yang dibentuk antara kelompok tani dan perkebunan besar swasta masih belum optimal, tidak semua kelompok tani mendapatkan akses sehingga masih dijual ke tengkulak dengan harga rendah dibandingkan harga pasar.

Tindak lanjut dan langkah -langkah yang dapat diambil dalam upaya pemecahan masalah pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan :

- Mendorong peningkatan produksi komoditi perkebunan secara kuantitas dan kualitas, peningkatan kualitas sumber daya petani melalui bimbingan teknis dan intens dalam pembinaan kepada petani untuk menerapkan teknologi pasca panen yang baik dan benar untuk mendapatkan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan.
- Memberikan pemahaman dan motivasi kepada para petani bahwa dengan melakukan pengolahan sederhana dengan baik dan benar terhadap hasil panen mereka akan dapat mendongkrak nilai jual hasil panen mereka menjadi lebih tinggi dibandingkan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.
- Mutu hasil dapat ditingkatkan melalui penerapan pasca panen yang baik dan benar sehingga dapat menekan kehilangan/kerusakan/penyusutan hasil panen, memperpanjang daya simpan dan meningkatkan rendemen, menumbuhkan kembangkan kelembagaan usaha pasca panen, meningkatkan nilai tambah, daya saing serta meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan petani.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan , tumbuhan dan mikro organisme di prioritaskan untuk komoditi aren. Sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih yang bermutu tinggi dan bersertifikat. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mempersiapkan sumber benih tanaman aren genjah kutim yang diharapkan menjadi sentra produksi benih dan sentra sumber benih aren di Indonesia. Lokasi kebun induk ada di desa Kolek kecamatan Sangkulirang dan kebun sumber benih aren genjah di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan.

Salah satu upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat dan sesuai rekomendasi dan penerapan sistem usaha tani yang sesuai. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mempersiapkan sumber benih tanaman aren genjah Kutai Timur diharapkan menjadi sentra produksi dan sentra sumber benih, maka dilakukan pembangunan kebun induk aren seluas 5 Ha di desa koleq kecamatan Sangkulirang.

Pada Tahun 2024 dengan populasi 400 pohon tertanam dengan luas 2 ha , sudah dilaksanakan pemeliharaan berupa pengendalian gulma. Terjadi penurunan luasan sebanyak 3 Ha dari total keseluruhan 5 Ha, hal ini disebabkan tanaman aren dimakan hewan ternak seperti sapi dan kambing. Dari 400 pohon yang masih ada sekitar 40 pohon sudah mengeluarkan mayangnya, sehingga perlu penanganan dalam hal ini pemupukan lebih lanjut. Prosedur pemupukan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran pembelian pupuk tidak ada. Permasalahan yang muncul dalam pembangunan kebun induk rona awal lahan berupa semak, berada di puncak perbukitan dan kondisi tanah kering dan sulit air, mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak seragam dan relatif terhambat serta kerdil dan banyak tanaman yang mati. Perlu adanya penyulaman lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Terdapat gangguan gulma dan tanaman merambat karena kurangnya perawatan dan tenaga dalam memelihara kebun induk.

Perlunya dilakukan pemeliharaan lebih intensif dengan penyediaan pupuk dan herbisida dalam pengendalian hama terutama semak belukar, baik untuk kebun sumber benih dan kebun induk aren genjah Kutai Timur. Dilakukan penyulaman terhadap tanaman yang sudah tua atau mati agar ketersediaan populasi dalam kawasan dapat terpenuhi.

Untuk indikator kinerja Jumlah Prasarana pertanian yang disediakan target 1 Prasarana dan tercapai 0 prasarana (0%) didalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdapat kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang difokuskan untuk pendataan CPCL (Calon lahan dan Calon Petani). Kegiatan pengembangan prasarana pertanian untuk pengembangan perkebunan rakyat adalah untuk mendapatkan gambaran yang terarah pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam menentukan perencanaan pengembangan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi di lapangan terutama yang berkaitan dengan bantuan komoditi yang akan disalurkan kepada petani/pekebun, serta sub kegiatan terkait peningkatan jalan usaha tani.

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung lainnya adalah (a) Menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan; (b) Ketersediaan data calon petani dan calon lahan yang merupakan persyaratan awal sebelum melakukan pengembangan prasarana pertanian/perkebunan (c) Mempersiapkan calon petani dan calon lahan dalam rencana pengembangan sehingga program lebih terarah; (d) Untuk mendapatkan data spasial berupa peta potensial lahan dalam format SHP yang akan digunakan untuk monitoring dan pembinaan terhadap petani pekebun; (e) Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian/perkebunan; (f) Mewujudkan tata kelola budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik pekebun; (g) Mendorong terwujudnya praktek pengolahan perkebunan yang baik di level pekebun.

Dengan adanya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dapat memberikan kejelasan informasi calon lahan dan calon petani yang akan menerima bantuan baik kegiatan berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam setiap program pengembangan dan perluasan lahan perkebunan serta menjadi data base informasi spasial dan dokumen administrasi perkebunan yang ada di Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur maupun Dinas Perkebunan Provinsi dalam menunjang keperluan petani maupun pekebun rakyat dalam pengusulan kegiatan di setiap tahunnya. Manfaat yang bisa diterima oleh petani maupun pekebun rakyat adalah memberi kemudahan dalam mengusulkan dan mendapatkan bantuan baik berupa pengadaan bibit, pupuk, pestisida, alat panen/pasca panen dan jalan produksi yang secara langsung akan memperbaiki tarap kehidupan serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat karena meningkatnya produksi.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian antara lain : (a) Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal karena kurangnya data spasial setiap lahan pekebun sehingga memakan waktu yang lama dalam pendataan lahan pekebun (b) . Akses jalan transportasi ke wilayah kecamatan yang masih banyak rusak sehingga pendataan stdb tidak maksimal (c) Lahan pekebun yang diusulkan sebagian besar berada didalam kawasan baik kawasan kehutanan maupun izin perkebunan (d) Petugas pendamping dalam menggunakan aplikasi belum maksimal dalam penginputan data pada proses pengolahan peta komoditas.

Tindak lanjut yang diambil antara lain : (a) Perlunya anggaran yang lebih besar lagi dalam dukungan pelaksanaan kegiatan ini untuk memenuhi semua kebutuhan data di semua kecamatan sehingga target yang diinginkan mudah dicapai dalam pengembangan prasarana pertanian di Kab. Kutai Timur terutama data spasial untuk potensi lahan yang diusulkan. (b) Ditambahnya kegiatan pelatihan di setiap Kecamatan dalam pelaksanaan teknis pembuatan STDB (c) Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang baru guna menunjang kinerja kegiatan ini. (d) Harus ada koordinasi rutin dengan instansi terkait dalam hal permasalahan status lahan sehingga penanganannya bisa terarah dan tepat tanpa menimbulkan konflik hukum dikemudian harinya.

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani ini merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan yang digunakan petani pekebun sebagai akses jalan pengangkutan hasil TBS kelapa sawit menuju pabrik. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi jalan yang digunakan sebagai akses pengangkutan hasil produksi TBS kelapa sawit rakyat menuju pabrik pengolahan CPO. Mempercepat/memperlancar mobilisasi sarana produksi dan alsintan dari kawasan pemukiman ke lahan usaha tani. Mempercepat pengangkutan produksi perkebunan dari lahan perkebunan menuju pabrik. Serta diharapkan dapat memperkecil biaya transportasi TBS sebagai komponen biaya produksi.. Dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dampak dan manfaatnya adalah memperlancar pengangkutan hasil produksi TBS petani, transportasi saprodi dan alsin sehingga dapat menunjang pembangunan perkebunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup petani/pekebun

Peningkatan jalan usaha tani pada tahun 2024 rencana dilaksanakan di Kelompok tani Harapan Jaya III Desa Karya Bhakti, Kelompok Tani Mandala Mekar Desa Wana Sari dan Kelompok Tani Berbuah Desa Dabeg Kecamatan Muara Wahau tidak terealisasi



karena SK Hibah dari Bupati Kutai Timur terlambat diterbitkan dan pelaksanaan dilaksanakan di anggaran perubahan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tidak cukup waktu.

Upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sebagai berikut :

- Adanya koordinasi yang baik diawal dari petani/pekebun maupun pihak-pihak terkait lainnya dengan Pihak Disbun dalam pengusulan bantuan agar lahan berstatus clean and clear bisa didapatkan.
- Proposal yang diusulkan sesuai dengan standar ketentuan dari Disbun
- Rincian Anggaran Biaya dan Perencanaan Jalan yang akan diusulkan bisa diuraikan dan disampaikan dengan data spasial serta dokumen foto terbaru (minimal foto citra Google Map untuk lokasi lahan) sebagai kelengkapan pendukung proposal

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dari target 400 ha yang dikendalikan dan ditangani 230 Ha. Kegiatan terbagi atas tiga sub kegiatan yakni pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; sub kegiatan dampak perubahan iklim; sub kegiatan pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan, difokuskan pada Penguatan Kelembagaan Pekebun dan Peningkatan Kapasitas Petugas serta Pencegahan, Pengendalian dan Monitoring OPT di Kecamatan kaliorang, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kongbeng dan Kecamatan Muara Wahau adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan Inventarisasi Serangan Hama tikus, pengamatan serangan ulat api;
- b. Bimbingan Teknis pembentukan RPO dan pembinaan regu pengendali;
- c. Pengendalian Kumbang tanduk dan pengendalian genoderma;
- d. Penyerahan Pupuk APH cair untuk kelompok tani;
- e. Pengendalian OPT yang ramah lingkungan dengan penggunaan pestisida nabati;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian OPT

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan sub kegiatan pengendalian OPT tanaman perkebunan :

- Belum adanya data hasil pengamatan secara berkala terhadap komoditi utama perkebunan (kelapa sawit, kakao dan karet)
- Kurangnya koordinasi antar instansi antara Dinas Perkebunan dengan Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Peternakan terkait pembagian tugas penyuluh pertanian lapangan.
- Belum ditetapkannya petugas pengamat OPT di seluruh wilayah kecamatan yang mengakibatkan belum optimalnya laporan serangan OPT.

Dalam rangka mengoptimalkna pelaksanaa kegiatan beberapa startegi tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan :

- Mengumpulkan dan menghimpun data serangan OPT yang masuk serta melakukan analisis terhadap data dan informasi yang ada;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat kabupaten maupun provinsi
- Menata dan mengatur petugas pengamat OPT di semua kecamatan agar dapat teramati dengan optimal dalam melaksanakan pengendalian dan penanggulangan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan khususnya untuk komoditi perkebunan

Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bertujuan memberikan pembinaan perlindungan areal dengan nilai konversasi tinggi (ANKT) dan pendataan sumber sumber air untuk peruntukan perkebunan dan upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan daya saing ekonomi, sinergitas pengembangan wilayah serta integrasi pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 antara lain :

- Monitoring dan perlindungan ANKT seluas 240 Ha di perkebunan besar swasta (a) PT. Sawit Sukses Sejahtera kecamatan Muara Ancalong Desa Senyuir (b) PT. Etam Bersama Lestari Kecamatan Sangkulirang Desa Pelawan (c) PT. Anugerah Alam Persada Kecamatan Karangan (d) PT. Nusaraya Agrosawit Kecamatan Kongbeng, sosialisasi dan monitoring memberikan masukan terkait konversi aturan pemerintah melakukan perbaikan dan menjaga tutupan lahan. Pemantauan terhadap pengelolaan ANKT yang di areal perizinan perkebunan.
- Peningkatan aparatur dengan mengikuti Bimtek Gas Rumah kaca di provinsi Bali

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan antara lain:

- a. Belum adanya Prosedur Standar Operasional (*Standart Operational Prosedure*) untuk melakukan pemantauan terhadap Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT);
- b. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas Petugas yang menangani ANKT;
- c. Belum adanya panduan yang baku (*toolskit*) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan ANKT di PBS;
- d. Belum selesainya penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RPP) ANKT untuk area di luar izin usaha perkebunan;
- e. Pelaporan dan pengiriman data yang lambat dari PBS;
- f. Kurangnya sarana untuk melaksanakan pemantauan di lapangan (drone, camera trap, dll).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penyelesaian sub kegiatan ini meliputi:

- a. Percepatan penyelesaian penyusunan RPP ANKT di luar izin usaha perkebunan, sehingga dapat diketahui luasan areal konservasi di luar Izin Usaha Perkebunan yang menjadi prioritas pengelolaan dan pemantauan ANKT oleh Dinas Perkebunan;
- b. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Petugas ANKT sehingga mampu untuk melaksanakan tugas secara optimal;
- c. Mengembangkan SOP untuk melaksanakan pemantauan ANKT di PBS maupun di luar PBS (perkebunan rakyat).

Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan antara lain :

- a. Pembentukan kelompok tani peduli api (KTPA) di Kecamatan Muara Ancalong (Desa Senyur , Desa Kelianjau Ilir), Kecamatan Telen (Desa Marah Haloq, desa Long melah)
- b. Bimbingan teknis pengendalian kebakaran lahan perkebunan di desa Marah Haloq , desa Long melah, Desa Tepian Indah.
- c. Sosialisasi Permentan No 05 Tahun 2018 tentang pembukaan dan atau pengolahan

lahan tanpa membakar dan monitoring alat sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun di PT. Subur Abadi Wana Agung kecamatan Busang desa Long Lees dan desa Rantau Sentosa.

- d. Pemberian bantuan alat pengendalian kebakaran lahan perkebunan di Kecamatan Muara Wahau (desa Muara Wahau, Desa Dabeq, desa Benhes, Desa Nehes Liah Bing, Desa Diak Lay), Kecamatan Kongbeng (Desa Miau Baru) , Kecamatan Rantau Pulung (Desa Tepian Makmur), Kecamatan Busang (Desa Rantau Sentosa), Kecamatan Muara Ancalong (Desa Long Tesak), Kecamatan Sangkulirang (Desa Peridan), Kecamatan Kaliorang (Desa Kaliorang), Kecamatan Bengalon (desa Tepian Langsung).

Pembangunan pertanian ke depan akan dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah biofisik, diantaranya perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini berdampak terhadap perubahan sistem fisik dan biologis lingkungan seperti intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, dan frekuensi serangan hama penyakit tanaman. Beberapa unsur iklim yang mengalami perubahan antara lain pola curah hujan, muka air laut, suhu udara dan peningkatan kejadian iklim ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan. Pertanian adalah sektor yang paling serius terkena dampak perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan satu diantara ancaman yang sangat serius terhadap sektor pertanian dan potensial mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian pada umumnya. Perubahan Iklim adalah kondisi beberapa iklim yang *magnitude* dan/atau intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari dinamika dan kondisi rata-rata, menuju ke arah (*trend*) tertentu (meningkat atau menurun). Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia (antropogenik) yang berkaitan dengan meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti CO<sub>2</sub>, methana (CH<sub>4</sub>), NO<sub>2</sub>, dan CFCs (*chlorofluorocarbons*) yang mendorong terjadinya pemanasan global dan telah berlangsung sejak hampir 100 tahun terakhir.

Permasalahan konflik dan gangguan usaha perkebunan memiliki karakter multidimensi yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial dan lingkungan, sehingga dengan demikian penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial dan kuratif serta harus melibatkan berbagai pihak. Konflik dan gangguan usaha perkebunan yang berkepanjangan, jika tidak diselesaikan dengan pendekatan yang benar. Beberapa



Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan antara lain: sengketa tanah dengan masyarakat, okupasi lahan oleh masyarakat, kemitraan usaha dan penjarahan.

Adapun permasalahan Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, antara lain:

- a. Belum adanya SOP yang jelas untuk penyelesaian konflik, sehingga diperlukan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya;
- b. Belum ditetapkannya tim penyelesaian konflik yang punya kekuatan hukum tetap (saat ini masih pembahasan untuk penetapannya);
- c. Belum semua PBS bermitra dan melakukan MoU dengan masyarakat sekitar untuk membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) untuk menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan / Pengolahan Lahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penyelesaian sub kegiatan ini meliputi:

- a. Segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan SK penetapan Tim Penyelesaian Konflik, sehingga penyelesaian konflik dapat dilaksanakan secara lebih optimal;
- b. Segera menyelesaikan SOP Penyelesaian Konflik, sehingga dalam setiap penyelesaian konflik bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik;
- c. Memetakan berbagai penyelesaian konflik yang terjadi dan menganalisisnya sehingga bisa diperkirakan upaya penyelesaiannya;
- d. Meminta PBS untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan / Pengolahan Lahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM), khususnya kerjasama dengan masyarakat sekitar tentang Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan dilapangan terkait dengan sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian terhadap kebun kemitraan dilakukan Penilaian Fisik Kebun Kemitraan dengan Pola Non Revitalisasi Perkebunan yang kelas kebunnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan terhadap Perusahaan Perkebunan yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membangun kebun masyarakat sekitar

minimal 20% sesuai ketentuan yang berlaku kepada perusahaan Perkebunan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan.

Pelaksanaan sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas dengan sasaran pelaksanaan pada Perusahaan Besar Swasta dan koperasi perkebunan sebagai mitra usaha serta dalam rangka menghadiri undangan mediasi dan rapat anggota tahunan koperasi, perjalanan dinas dimaksudkan untuk mengetahui Kualitas kebun masyarakat dan realisasi perkembangan pembangunan kebun kemitraan dapat berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 3.2.6.

Monitoring dan Evaluasi sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

| No | PBS/Koperasi                                                                                           | Kecamatan     | Kegiatan                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT. Bima Agri Sawit<br>Kop. Dugai Jaya Mandiri<br>Kop. Marukangan Sejahtera<br>Kop. Jaya Haran Bersama | Sandaran      | Undangan Rapat Anggota Tahunan                                                        |
| 2  | Koperasi. Omega                                                                                        | Muara Wahau   | Verifikasi Permohonan CPP                                                             |
| 3  | PT. Anugerah Lahan Kaltim                                                                              | Bengalon      | Verifikasi Permohonan CPP Kop. Ulun Lebo                                              |
| 4  | PT. Indonesia Plantations Sinergi<br>Kop. Putra Harapan                                                | Kaliorang     | Undangan Pertemuan Pembahasan Kemitraan PT. IPS                                       |
| 5  | Kop. Long Hol Jaya                                                                                     | Telen         | Verifikasi CPP Kop. Long Hol Tahap I                                                  |
| 6  | PT. Hijau Alam Raya                                                                                    | Sangkulirang  | Pengawasan dan Pembinaan Kebun Kemitraan di PT. HAR                                   |
| 7  | Kop. Long Hol Jaya                                                                                     | Telen         | Verifikasi CPP Kop. Long Hol Tahap II                                                 |
| 8  | Koperasi Tepian Prima Sawit                                                                            | Bengalon      | Verifikasi CPP Kop. Tepian Prima Sawit                                                |
| 9  | Koperasi Minsun Lekut                                                                                  | Muara wahau   | Wasbin Kop. Minsun Lekut                                                              |
| 10 | PT. Karya Prima Agro Sentosa                                                                           | Kongbeng      | Wasbin Kop. Mitra Usaha PT KPAS                                                       |
| 11 | Jasa mekar Tanjung Harapan                                                                             | Sangkulirang  | Verifikasi CPP Kop. Jasa mekar Tanjung Harapan                                        |
| 12 | PT. Hamparan Perkasa Mandiri                                                                           | Busang        | Wasbin Kop. Mitra PT. HPM                                                             |
| 13 | PT. Indonesia Plantations Sinergi                                                                      | Kaliorang     | Menghadiri Undangan Mediasi Di Polsek Kaliorang                                       |
| 14 | PT. Sangatta Sejahtera                                                                                 | Rantau Pulung | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebun Kemitraan 20% di PT. Sangatta Sejahtera     |
| 15 | Koperasi Rantau Pakis Jaya                                                                             | Karangan      | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebun Kemitraan 20% di Koperasi Rantau Pakis Jaya |



| No | PBS/Koperasi                                       | Kecamatan    | Kegiatan                                                          |
|----|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16 | PT. Etam Bersama Lestari                           | Sangkulirang | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebun Kemitraan 20% di PT EBL |
| 17 | PT. Bima Agri Sawit                                | Karangan     | Verifikasi Dokumen Permohonan Penilaian Fisik Kebun Kemitraan     |
| 18 | Koperasi Dharma Mulya Palma                        | Karangan     | Penilaian Fisik Kebun Koperasi Dharma Mulya Palma&Permata Jaya    |
| 19 | Koperasi Produsen Perkebunan Mitra Sawit Sejahtera | Sandaran     | Verifikasi CPP koperasi Produsen Perkebunan Mitra Sawit Sejahtera |
| 20 | Koperasi Permata Jaya                              | Karangan     | Penilaian Fisik Kebun Koperasi Dharma Mulya Palma&Permata Jaya    |
| 21 | Koperasi Perupuk                                   | Sangkulirang | Verifikasi CPP Kop. Perupuk                                       |
|    |                                                    |              |                                                                   |

Dalam pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota terbagi dalam 2 (dua) sub Kegiatan yaitu sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dan sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian tentunya tidak terlepas dari minimnya ketersediaan anggaran dari APBD Kabupaten Kutai Timur serta perlunya kerjasama TIM di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar koordinasi dapat berjalan dengan cepat dalam pengambilan Keputusan dan pelaksanaan kegiatan sehingga semua Perusahaan pemegang ijin dan koperasi mitra usaha dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan.

Strategi pemecahan masalah bisa dilakukan dengan membuat TIM kerja dengan maksud untuk percepatan pembangunan perkebunan serta TIM dalam penyelesaian permasalahan/konflik usaha Perkebunan baik berupa konflik social, konflik internal serta eksternal yang bisa menghambat kegiatan investasi di Kabupaten Kutai Timur.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan peningkatan anggaran kegiatan serta percepatan proses perencanaan anggaran pada awal tahun dan proses administrasi keuangan dipercepat karena tercapainya kegiatan harus ditunjang dengan dana dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, tentunya untuk mendapatkan hasil pengawasan dan pembinaan yang konsisten serta berkelanjutan dapat dilakukan dengan anggaran yang cukup. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota dalam penerapannya berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Kemitraan perkebunan pada Dinas perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha pertanian dalam hal ini Perusahaan/Koperasi yang bergerak dalam usaha perkebunan yang akan dilakukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut secara umum meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lingkungan. Ruang lingkup kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian ini penting untuk memastikan bahwa izin usaha pertanian yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat

Tabel. 3.2.7.  
Penilaian Usaha Perkebunan yang Terealisasi Tahun 2024

| No | Nama Perusahaan                  | Lokasi/Kecamatan | No. IUP                      | Kelas |
|----|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| 1  | PT. Tridaya Hutan Lestari        | Kaubun           | 400.14.1/04/PUP-DISBUN       | III   |
| 2  | PT. Bima Palma Nugraha           | Bengalon         | 188.4.45/032/Eko.1-II/2015   | II    |
| 3  | PT. Bima Agri Sawit              | Karangan         | 525.26/208/Eko.1-XI/2016     | II    |
| 4  | PT. Sabhantara Rawi Sentosa      | Telen            | 561/02.188.45/HK/X/2007      | III   |
| 5  | PT. Indonesia Plantation Synergi | Kaliorang        | 188.4.45/201/Eko.1-X/2015    | II    |
| 6  | PT. Sinergi Agro Industri        | Sangkulirang     | 525.26/K.315/HK/V/2018       | II    |
| 7  | PT. Perkebunan Warga Rimba       | Karangan         | 503/04/DPMPTSP-PPNP/IUP/2020 | III   |
| 8  | PT. Tapan Nadenggan              | Ma.Wahau/Telen   | 188.4.45/121/Eko.1-XII/2011  | II    |
| 9  | PT. Kresna Duta Agroindo         | Ma.Wahau/Telen   | 1188.4.45/159/Eko.1-X/2012   | II    |
| 10 | PT. Long Bagun Prima Sawit       | Karangan         | 778/Menhutbun/II/2000        | III   |
| 11 | PT. Wahana Tritunggal Cemerlang  | Karangan         | 500/042/Eko.2.IX/2008        | III   |
| 12 | PT. Anugerah Energitama Bengalon | Bengalon         | 188.4.45/027/Eko.1-III/2014  | II    |
| 13 | PT. Anugerah Energitama Telen    | Telen            | 500/037/Eko.1-II/2011        | II    |
| 14 | PT. Gunta Samba                  | Kongbeng         | 500/198/Eko.2/IX/2009        | II    |
| 15 | PT. Kalimantan Agronusantara     | Rantau Pulung    | 188.4.45/199/Eko.1-IX/2014   | II    |
| 16 | PT. Citra Palma Sejati           | Sandaran         | 188.4.45/079/Eko.1-IX/2011   | II    |

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur dari dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, dinas tata ruang, dan instansi terkait lainnya

Alokasi anggaran tahun 2024 yang berasal dari APBD untuk kegiatan fisik dan lapangan sudah terlaksana semua dengan target 16 (tujuh belas) perusahaan di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan untuk alokasi anggaran yang berasal dari FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) untuk tahun 2024 masih belum bisa dilaksanakan.

Hal ini dikarenakan dana dari FCPF itu tersedia mendekati akhir tahun tepatnya di triwulan IV tahun 2024, sehingga untuk mencapai target pelaksanaannya dengan waktu yang tersisa tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan.

Permasalahan tidak terselenggaranya kegiatan fisik terutama perjalanan Dinas Dalam Daerah ke beberapa Kecamatan dalam rangka Pengawasan dan Pembinaan terhadap kebun perusahaan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur adalah, adanya kegiatan luar daerah yang diadakan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur dan Instansi terkait lainnya berupa rapat/pertemuan yang sifatnya tidak terduga atau di luar rencana yang sudah dijadwalkan yang merupakan tugas tambahan.

Di samping itu, karena Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran terkait dengan peraturan/perundangan, dan hukum, maka tak jarang adanya undangan mendadak sebagai saksi ahli dan lainnya baik dari Kepolisian Resort dan Daerah maupun Kejaksaan Tinggi Negeri.

Hal ini secara umum, tentunya juga berpengaruh pada kegiatan yang sudah direncanakan berupa pergeseran jadwal kunjungan ke lapangan dari target rencana pelaksanaan monitoring dan penilaian usaha perkebunan sehingga waktu yang diperlukan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan kegiatan lapangan.

Pelaksanaan kegiatan untuk tahun selanjutnya, yakni di tahun 2024 agar anggaran bisa terserap adalah sebagai berikut :

- Mengumpulkan informasi terkait rencana kegiatan usaha perkebunan di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur yang sering mengadakan kegiatan baik rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan sebagainya.
- Meningkatkan koordinasi antar-lembaga. Koordinasi antar-lembaga yang baik dapat membantu memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat membantu memastikan bahwa dana digunakan secara tepat sasaran. Pada tahun 2024 untuk kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan yang membutuhkan petugas penilai bersertifikat, telah dilakukan pelatihan khusus petugas penilai baru untuk mengatasi kekurangan tenaga penilai dalam melaksanakan kegiatan.

Pelaksanaan sekolah lapang yang dilaksanakan dari sub kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota, Bidang Pengembangan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan sekolah lapang untuk komoditi tanaman kakao;
2. Pelaksanaan sekolah lapang dilaksanakan pada tanggal, 27 sampai dengan 30 Agustus 2024 di Desa Karang Ilir Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur;
3. Petani yang mengikuti kegiatan sekolah lapang tersebut adalah petani yang tergabung di dalam kelompok tani;
4. Kelompok tani yang mengikuti kegiatan tersebut adalah kelompok Tani Subur Raya B, Kelompok Tani Karya Indah Lestari dan Kelompok Tani Bunga Muda A.

Pelaksanaan sekolah lapang yang dilaksanakan pada Kelompok Tani Subur Raya B, Kelompok Tani Bunga Muda A dan Kelompok Tani Karya Indah Lestari, sebagai berikut:

1. Pengenalan klon/jenis kakao yang dikembangkan di Indonesia terutama di Kabupaten Kutai Timur khususnya di Kutai Timur;
2. Teknik persiapan bahan tanam/bibit, yaitu untuk bibit hibrida dan kloning;
3. Pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman kakao;
4. Penetapan jarak tanam dan pemancangan tanaman kakao;
5. Teknik pemangkasan tanaman kakao;
6. Pemupukan tanaman kakao;
7. Penanaman tanaman penanang
8. Pemeliharaan terhadap hama dan penyakit tanaman;
9. Teknik pemanenan buah kakao, dan
10. Pasca panen kakao.

Pelaksanaan sekolah lapang yang dilaksanakan berdasarkan kelas, yaitu ditetapkan menjadi tiga (3) kelas yaitu kelas A Kelompok Tani Bunga Muda A, Kelas B Kelompok Tani Subur Raya B dan Kelas C Kelompok Tani Karya Indah Lestari.

Untuk sasaran Strategis Terpenuhinya tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan indikator kinerja adalah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan target 100% dan realisasi 90% dengan persentase capaian 90 %.

Tugas dan fungsi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebagai perumusankebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan, Produksi dan Usaha Tani serta Perlindungan Tanaman Perkebunan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional bagi masyarakat khususnya petani perkebunan dan stakeholder yang berkecimpung di bidang perkebunan

Untuk mewujudkan kualitas dan Kuantitas SDM yang Profesional serta Tata Organisasi / Kelembagaan yang dinamis pada lingkup perkebunan , dapat dicapai dengan Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Perkebunan yang memadai dan Meningkatkan pertumbuhan dan penataan kelembagaan dinas dan Usaha lingkup Perkebunan. Terwujudnya Pelayanan tentang Informasi dan Perencanaan Pelaporan Perkebunan, dengan meningkatkan pelayanan Informasi Data Perencanaan dan Pelaporan SKPD Dinas Perkebunan

Dalam mewujudkan pengelolaan administrasi Perkantoran, keuangan dan Kepegawaian Perkebunan, perlu ditingkatkannya Kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Perkebunan Meningkatkan Pelayanan tata Kelola Administrasi Perkantoran dan KeuanganPada Dinas Perkebunan

**Tabel 3.2.8.**

Terpenuhinya tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                      | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET | REALISASI | %  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|
| 1  | Terpenuhinya tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 100 %  | 90%       | 90 |

**3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2024**

**Tabel 3.3.1**  
**Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | CAPAIAN    |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |                                                                                         |                                                                 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
| 1  | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan                             | 100%       | 100%       |
| 2  | Terpenuhinya tata kelola Administrasi perkantoran dan laporan keuangan                  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 90%        | 90%        |

Berkenaan dengan adanya Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran dan indikator sasaran mengalami perubahan sehingga sasaran dan indikator sasaran tidak sama antara tahun 2023 dengan 2024. Pada tahun 2003 dilakukan revaluasi Rencana strategis Dinas Perkebunan dengan ada perubahan di beberapa indikator.

Jika dilihat dari Capaian Kinerja tahun 2024 pada indikator sasaran sudah mencapai target yang sudah ditetapkan baik yang tertuang di renstra maupun dari Perjanjian Kinerja Perangkat daerah.

**3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Terhadap Target Renstra Tahun 2021-2026**

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2024) terhadap total target Renstra di tahun 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel 3.4.1 berikut ini:

Tabel 3.4.1.

Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap Renstra

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | SATUAN | TARGET KINERJA RENSTRA | REALISASI SAMPAI SAAT INI | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk perkebunan | Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan                             | Ton    | 6.100.000 Ton          | 6.226.862 Ton             | 100         |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan                  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan laporan keuangan | %      | 100                    | 90                        | 90          |

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026, maka secara umum belum semuanya indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 95 %, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode RENSTRA awal Dinas Perkebunan.

### 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan , Peningkatan / Penurunan Kinerja dan alternative solusi yang dilaksanakan.

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2024 ini ada yang melebihi hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing

penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.

- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- d. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari SKPD lain/stakeholder dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.
- b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan koperasi atau Perkebunan Besar Swasta untuk mendukung beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan
- c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Mitra Kerja menuju pembangunan perkebunan yang berkelanjutan

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten kutai Timur.
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas Perkebunan. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga



- diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2024 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
  - d. Indikator pada level impact dan Outcome pada Dinas Perkebunan umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya.
  - e. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD dan di TAPD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.



### 3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 6 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

| NO     | PROGRAM / KEGIATAN                                                         | PAGU ANGGARAN  | REALISASI ANGGARAN |       | REALISASI FISIK (%) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------|---------------------|
|        |                                                                            |                | Rp.                | %     |                     |
| 1      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA                | 17.547.337.033 | 15.898.854.263     | 90.61 | 93.72               |
| 2      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                       | 14.395.000.000 | 12.277.104.713     | 85.29 | 85.44               |
| 3      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                    | 10.750.000.000 | 2.062.316.320      | 19.18 | 19.52               |
| 4      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN / KOTA | 1.300.000.000  | 929.888.673        | 71.53 | 84.31               |
| 5      | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                          | 607.373.219    | 546.521.673        | 89.98 | 90.42               |
| 6      | PROGRAM PEYULUHAN PETANIAN                                                 | 4.600.000.000  | 4.320.856.262      | 93.93 | 97.52               |
| JUMLAH |                                                                            | 49.199.710.252 | 36.035.541.904     | 73.24 | 86.30               |

Realisasi anggaran dan dan Realisasi Fisik program hampir semua sudah mencapai target hanya Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian yang realisasinya sangat rendah karena proses pelaksanaan peneingkatan jalan usaha tani mengalami terkendala dan tidak dapat dilaksanakan karena surak keputusan hibah terbit di akhir tahun anggaran serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaa kegiatan. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdapat dana dari Bagi hasil sawit yang peruntukannya untuk pendataan kebun masyarakat penunjang penerbitan STDB, dimana dalam pelaksanaanya baru di 10 kecamatan sehingga silva anggaran yang dikembalikan cukup banyak, pelaksanaanya belum maksimal karena terkendala tenaga

teknis di lapangan yang masih kurang, pendampingan pelaksanaan ISPO bagi petani tidak semua dilaksanakan terkait waktu pelaksanaan yang terbatas karena dilaksanakan pada saat anggaran perubahan dan nomenklatur sub kegiatan baru bisa di rubah di anggaran perubahan, sedangkan kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Aspek Daerah Kelapa sawit Berkelanjutan tidak dilaksanakan karena anggaran penyusunan RAD KSB sudah dilaksanakan dengan mitra pembangunan sehingga tinggal pengajuan pengesahannya ke Bupati Kutai Timur sehingga anggaran sejumlah 500 juta harus dikembalikan ke kas daerah.

### 3.8. Realisasi Anggaran

Aktivitas Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan dan mendukung Rencana Strategis (RENSTRA) tidak terlepas dari penganggaran (Budgeting), karena dukungan anggaran akan mengimplementasikan rencana kinerja (performance plan). Dukungan anggaran tersebut pada tahun 2024 berasal dari dana APBD II , Dana Bagi Hasil Sawit dan Dana FCPF dengan total anggaran perubahan **Rp. 49.199.710.252,-** realisasi sebesar **Rp. 36.035.541.904** atau sebesar 73,24% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Sebagai berikut:

**Tabel 3.8.1.**  
**Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja**

| NO | SASARAN                                                                                 | KINERJA       |               |             | KEUANGAN              |                       |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|    |                                                                                         | TARGET        | REALISASI     | CAPAIAN (%) | TARGET                | REALISASI             | CAPAIAN (%)   |
| 1  | Meningkatnya produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk perkebunan | 6.100.000 Ton | 6.226.862 Ton | 100%        | 31.652.373.219        | 20.136.687.641        | 63,62%        |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan                  | 100%          | 90%           | 90%         | 17.547.337.033        | 15.898.854.263        | 90,61%        |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                           |               |               | <b>95%</b>  | <b>49.199.710.252</b> | <b>36.035.541.904</b> | <b>73.24%</b> |



**Tabel 3.2.2**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2024**

| NO       | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | PAGU ANGGARAN         | REALISASI ANGGARAN    |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|          |                                                                                       |                       | Rp.                   | %            |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                  | <b>17.547.337.033</b> | <b>15.898.854.263</b> | <b>90.61</b> |
| <b>1</b> | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       | <b>625.000.000</b>    | <b>457.818.829</b>    | <b>76.13</b> |
| a        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 150.000.000           | 118.243.484           | 78.83        |
| b        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | 100.000.000           | 72.507.855            | 72.51        |
| c        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA - SKPD                                        | 100.000.000           | 59.845.000            | 59.85        |
| d        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD                                          | 50.000.000            | 49.665.239            | 99.33        |
| e        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD                                        | 50.000.000            | 48.587.390            | 97.17        |
| f        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 75.000.000            | 64.957.390            | 86.61        |
| g        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 100.000.000           | 44.012.443            | 44.01        |
| <b>2</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>12.822.337.033</b> | <b>11.692.772.415</b> | <b>91.19</b> |
| a        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 11.017.093.902        | 10.026.272.576        | 91.01        |
| b        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 1.305.243.131         | 1.213.983.202         | 93.01        |
| c        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 500.000.000           | 452.516.637           | 90.50        |
| <b>3</b> | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>                | <b>150.000.000</b>    | <b>108.886.250</b>    | <b>98.99</b> |
| a        | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 100.000.000           | 74.831.250            | 74.83        |
| b        | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 50.000.000            | 26.618.800            | 53.24        |
| <b>4</b> | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>400.000.000</b>    | <b>355.456.756</b>    | <b>88.86</b> |
| a        | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 250.000.000           | 234.966.000           | 93.87        |
| b        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya                      | 150.000.000           | 120.779.756           | 80.52        |
| <b>5</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>1.320.000.000</b>  | <b>1.204.331.898</b>  | <b>91.23</b> |
| a        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan                           | 50.000.000            | 49.966.000            | 99.93        |



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**TAHUN 2024**

| NO        | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                      | PAGU ANGGARAN         | REALISASI ANGGARAN    |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|           |                                                                                                                        |                       | Rp.                   | %            |
|           | Kantor                                                                                                                 |                       |                       |              |
| b         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                           | 500.000.000           | 478.544.350           | 95.71        |
| c         | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                               | 50.000.000            | 49.997.000            | 99.99        |
| d         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   | 470.000.000           | 383.149.668           | 81.52        |
| e         | Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD                                                                                       | 250.000.000           | 242.674.880           | 97.07        |
| <b>6</b>  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                       | <b>150.000.000</b>    |                       | <b>93,90</b> |
| a         | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                                                                          | 150.000.000           |                       | 93.90        |
| <b>7</b>  | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                   | <b>300.000.000</b>    | <b>282.850.832</b>    | <b>94.28</b> |
| a         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                | 150.000.000           | 132.951.832           | 88.63        |
| b         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                  | 150.000.000           | 149.899.000           | 99.93        |
| <b>8</b>  | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>1.730.000.000</b>  | <b>1.616.380.019</b>  | <b>93.43</b> |
| a         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan           | 230.000.000           | 209.687.220           | 91.17        |
| b         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 100.000.000           | 94.835.000            | 94.84        |
| c         | Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | 1.400.000.000         | 1.311.857.799         | 93.70        |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                            | <b>14.395.000.000</b> | <b>12.277.104.713</b> | <b>85.29</b> |
| <b>9</b>  | <b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                                 | <b>14.095.000.000</b> | <b>12.078.981.913</b> | <b>85.69</b> |
| a         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                | 10.750.000.000        | 9.902.160.180         | 85.67        |
| b         | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                     | 3.345.000.000         | 2.869.821.733         | 85.79        |
| <b>10</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG )Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</b> | <b>300.000.000</b>    | <b>198.122.800</b>    | <b>66.04</b> |
| a         | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman                                                         | 300.000.000           | 198.122.800           | 66.04        |



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024

| NO         | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                     | PAGU ANGGARAN        | REALISASI ANGGARAN   |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|            |                                                                                                       |                      | Rp.                  | %     |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                        | 10.750.000.000       | 2.062.316.320        | 19.18 |
| <b>11</b>  | <b>Kegiatan Pengembangan sarana Pertanian</b>                                                         | <b>9.950.000.000</b> | <b>1.939.734.620</b> | 19.49 |
| a          | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                     | 9.950.000.000        | 1.939.734.620        | 19.49 |
| <b>12</b>  | <b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                       | <b>800.000.000</b>   | <b>122.581.700</b>   | 15.32 |
| a          | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                            | 800.000.000          | 122.581.700          | 15.32 |
| <b>IV</b>  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                      | 1.300.000.000        | 929.888.673          | 71.53 |
| <b>13</b>  | <b>Kegiatan Pengendalian dan Pengendalian Bencanan Pertanian Kabupaten / Kota</b>                     | <b>1.300.000.000</b> | <b>929.888.673</b>   | 71.53 |
| a          | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan        | 350.000.000          | 306.209.251          | 87.49 |
| b          | Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                 | 400.000.000          | 249.213.487          | 62.30 |
| c          | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 550.000.000          | 374.465.935          | 68.08 |
| <b>V</b>   | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                              | 607.373.219          | 546.521.673          | 89.98 |
| <b>14</b>  | <b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>  | <b>607.373.219</b>   | <b>546.521.673</b>   | 89.98 |
| a          | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                            | 307.373.219          | 246.948.573          | 80.34 |
| b          | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian                                               | 300.000.000          | 299.573.100          | 99.86 |
| <b>VI</b>  | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                   | 4.600.000.000        | 4.320.856.262        | 93.93 |
| <b>15</b>  | <b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                      | <b>4.600.000.000</b> | <b>4.320.856.262</b> | 93.93 |
| a          | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                         | 2.250.000.000        | 2.143.140.590        | 95.25 |
| b          | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                       | 2.000.000.000        | 1.856.804.849        | 92.84 |



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024

| NO     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | PAGU ANGGARAN  | REALISASI ANGGARAN |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|
|        |                                                                                      |                | Rp.                | %      |
| c      | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian                   | 50.000.000     | 50.000.000         | 100.00 |
| d      | Pembantukkan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 300.000.000    | 270.910.823        | 90.30  |
| JUMLAH |                                                                                      | 49.199.710.250 | 36.035.541.904     | 73.24  |

Pada tahun Anggaran 2024 Pagu Anggaran Dinas Perkebunan berjumlah Rp. 49.199.710.250,- Maka Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 36.035.541.904,- dengan Prosentase proggres keuangan sebesar 73,24%.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

Dari data diatas kesimpulan umum mengenai pencapaian Dinas Perkebunan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pagu anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah mengalami perubahan sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perkebunan dari semula sebesar Rp. 40.213.538.044,- menjadi Rp. 49.199.710.250,- mengalami penambahan sebesar Rp. 8.986.172.206,-.
2. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan program / kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.035.541.904,- dengan persentase sebesar 73,24 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 49.199.710.250,- dan realisasi fisik sebesar 77,02 %.
3. Pada tahun Anggaran 2024 rata-rata capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 95%. Capaian tersebut diukur berdasarkan 2 Sasaran Strategis terdiri dari 6 Program yang dijabarkan ke dalam 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2024 mencapai target kinerja rata-rata sebesar 95%.
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Terhadap Renstra Tahun 2021-2026 mencapai target kinerja rata-rata 95%.

Pada beberapa pelaksanaan kegiatan masih ditemui masalah dan kendala yang harus dicarikan solusi dan pemecahannya melalui koordinasi, sinkronisasi dari berbagai pihak sehingga didapat pencapaian indikator dan target kinerja yang maksimal khususnya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan .

### **4.2 SARAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepala Organisasi Perangkat Daerah pada akhir tahun anggaran dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian



kinerja suatu unit kerja seperti dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) mempunyai fungsi antara lain sebagai:

1. Sarana hubungan kerja organisasi;
2. Sarana akuntabilitas;
3. Sarana informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan

Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam proses penilaian mulai dari penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Semoga laporan ini menjadi salah satu perwujudan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah khususnya di sub sektor Perkebunan yang lebih transparan dan *akuntabel*.